

BADAN PENGURUS
PERKUMPULAN FOREST WATCH INDONESIA
2015-2019



Daftar Isi

PENGANTAR.....	2
KEORGANISASIAN, STRUKTUR PERKUMPULAN FWI & EKSEKUTIF....	3
PERKEMBANGAN PROGRAM KERJA FWI	7
PROGRAM KERJA DAN CAPAIAN	10
PENGEMBANGAN BADAN USAHA	26
LAYANAN INFORMASI	27
PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI.....	27
PENGELOLAAN ASET.....	29
LAMPIRAN - LAMPIRAN:.....	29

PENGANTAR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ini disusun untuk keperluan evaluasi dan monitoring terhadap pencapaian agenda-agenda kerja Badan Pengurus (BP) Forest Watch Indonesia (FWI), terhitung dari Juli 2015 sampai dengan Desember 2019 yang telah disusun berdasarkan Program Kerja FWI sebagai penjabaran mandat Pertemuan Anggota (PA) Perkumpulan FWI pada tanggal 16 Juni 2015 di Hotel Fave, Bogor, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa Program Kerja Perkumpulan FWI dirumuskan dan ditetapkan melalui Rapat Gabungan Badan Pengurus (BP) dan Dewan Pengawas (DP) berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forest Watch Indonesia (FWI) yang mengamanatkan untuk melaksanakan hasil Pertemuan Anggota (PA) Perkumpulan FWI. Setelah mendapatkan masukan dari anggota dan pada bulan Juli 2015 dilanjutkan melalui Rapat Gabungan BP dan DP sebagai mandat dari Pertemuan Anggota, maka ditetapkan Program Kerja FWI periode tahun 2015 – 2018 sebagai berikut:

- a. Membangun pusat data dan informasi alternatif kehutanan yang terkini, terstruktur, terintegrasi dan akurat, yang dibangkitkan dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Program kerja ini bertujuan untuk mewujudkan FWI sebagai pusat pangkalan data dan penyedia informasi alternatif kehutanan yang kredible dan terbaru (*up to date*) untuk mengupayakan tata kelola sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, FWI mampu melaksanakan peran dan fungsi pelayanan data dan informasi alternatif yang mudah diakses oleh publik, terutama bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melaksanakan pemantauan kondisi tutupan hutan alam, kinerja unit kelola dan pemanfaatan sumberdaya hutan, maupun mempromosikan model-model pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Program kerja ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya penghilangan maupun perusakan hutan alam yang tersisa melalui pemantauan secara periodik, melakukan pemantauan kinerja perusahaan hutan dan lahan, serta mempromosikan model-model pengelolaan hutan yang adil dan lestari, khususnya yang dikelola oleh masyarakat lokal dan adat.
- c. Mendorong perubahan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan kehutanan melalui kerja-kerja pemantauan yang dilakukan FWI. Program kerja ini bertujuan untuk mendorong pembaruan kebijakan di sektor kehutanan berdasarkan temuan dan fakta yang diperoleh dari kegiatan pemantauan. Di samping itu, juga meningkatkan keterlibatan dan keaktifan FWI dalam proses-proses perumusan kebijakan kehutanan, sehingga pelaksanaannya bisa menjamin prinsip terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
- d. Menyusun produk (publikasi) FWI yang menjadi rujukan para pihak. Program ini bertujuan agar data dan informasi alternatif yang dikemas melalui publikasi FWI, akan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan kehutanan. Harapannya akan memunculkan debat dan terbangunnya wacana untuk mendorong pembaharuan kebijakan di sektor kehutanan. Program kerja ini akan membangun citra FWI sebagai lembaga penyedia data dan informasi alternatif yang berkualitas, dan menjadi rujukan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan.
- e. Mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Program kerja ini akan mengarahkan sasarannya untuk mengajak para pihak agar terlibat secara aktif dan konstruktif dalam kegiatan pemantauan, kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh FWI, sehingga secara bersama-sama mendorong perbaikan tata kelola di sektor kehutanan.

- f. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan FWI yang berkompeten dalam mewujudkan perbaikan tata kelola kehutanan. Program kerja ini akan meningkatkan kapasitas teknis sumberdaya manusia (SDM) FWI dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi. Program kerja ini juga akan meningkatkan kapasitas kelembagaan FWI dalam melakukan pemantauan untuk mendorong pembenahan tata kelola hutan yang lebih baik.

Laporan pertanggungjawaban ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus FWI terhadap pemenuhan ketentuan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mengatur bahwa setiap anggota FWI berhak memperoleh laporan tertulis yang disampaikan pada Pertemuan Anggota FWI. Namun demikian, Badan Pengurus menyadari adanya keterlambatan waktu untuk menyelenggarakan Pertemuan Anggota tahun ini. Pemenuhan akan audit kelembagaan tahunan selama periode kepengurusan 2015-2018, sebagai salah satu capaian dalam program kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya.

Kerangka laporan ini disusun atas: penjabaran terhadap pokok-pokok mandat, penjelasan singkat program kerja dan pencapaiannya, di bidang database, kampanye-advokasi, media *outreach*, layanan informasi, pengelolaan aset, pengelolaan proyek dan keuangan terhitung dari bulan Juli 2015 – Desember 2019.

KEORGANISASIAN, STRUKTUR PERKUMPULAN FWI & EKSEKUTIF

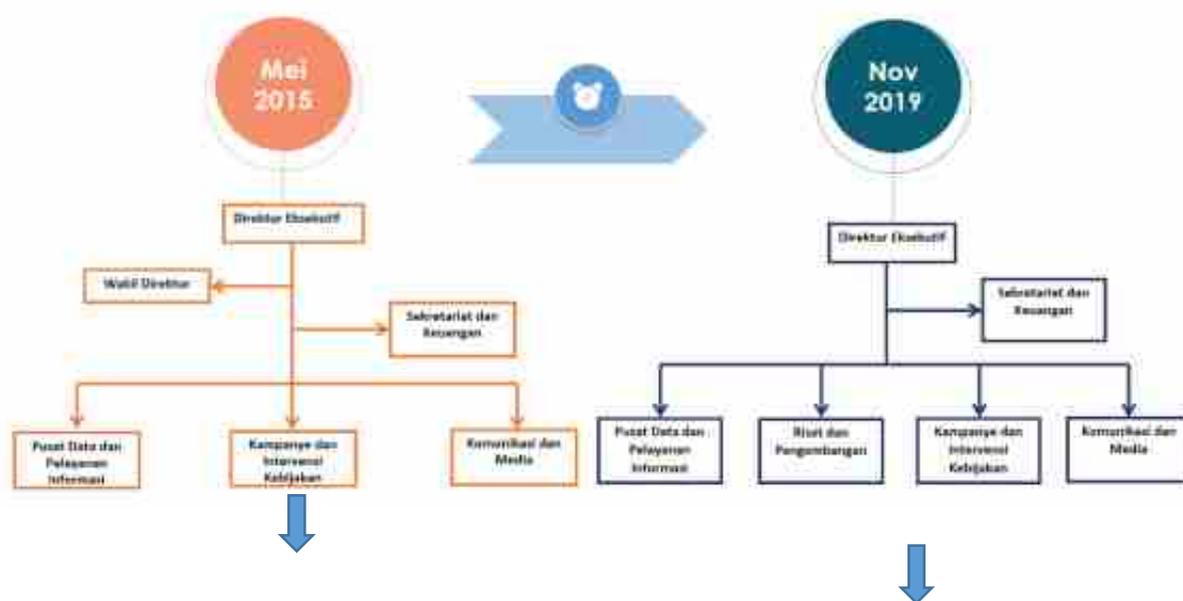
Sebagaimana yang diatur pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FWI maka Struktur Perkumpulan Forest Watch Indonesia terdiri dari Pertemuan Anggota (PA), Badan Pengurus (BP), dan Dewan Pengawas (DP). Badan Perkumpulan FWI adalah komponen pelaksana mandat organisasi yang dirumuskan melalui Pertemuan Anggota. Sedangkan dalam pelaksanaan mandat tersebut, maka kemudian Badan Pengurus membentuk Alat Kelengkapan Badan Pengurus, diantaranya Eksekutif, Badan Usaha, Komisi-Komisi dan Badan Otonom lainnya.

Struktur Perkumpulan FWI periode 2015-2018 dapat digambarkan dalam bagan berikut, dalam perkembangannya selama periode 2015 – 2019 terjadi perubahan personil. Salah seorang anggota Dewan Pengawas FWI yaitu Saudara Togu Manurung menyatakan mengundurkan diri dan ditetapkan melalui SK Badan Pengurus No. 001/2018 tertanggal 23 Juli 2018 (*).



Perkembangan Eksekutif sebagai Alat Kelengkapan Badan Pengurus

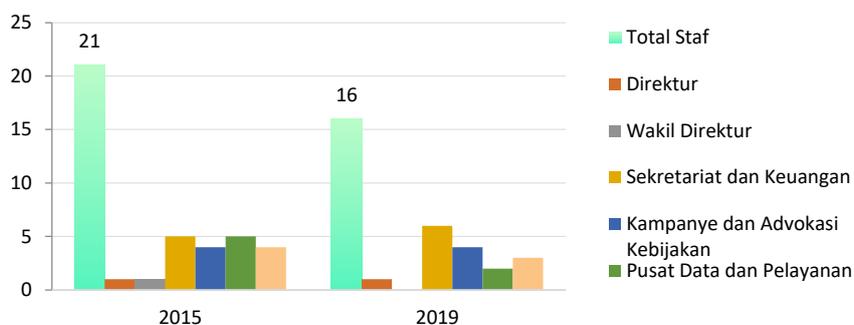
Dalam konteks pengelolaan program kerja maka Badan Pengurus membentuk alat kelengkapan yaitu Eksekutif untuk membantu dalam implementasikan program kerja tersebut, sekaligus untuk menjalankan operasional sekretariat FWI. Periode Juli 2015 - September 2016, sekretariat FWI dipimpin oleh Ketua Perkumpulan (Christian Purba) yang merangkap sebagai pelaksana Direktur Eksekutif. Kemudian terjadi rotasi kepemimpinan di sekretariat FWI, dengan mengangkat Sekretaris Perkumpulan (Soelthon G.N) sebagai pelaksana Direktur Eksekutif berdasarkan SK Badan Pengurus No. 002/SK-akt/BP-Perkumpulan FWI/X/2016 tertanggal 07 Oktober 2016. Perkembangan struktur Eksekutif digambarkan pada bagan berikut:





Sampai dengan Desember 2019, jumlah Staff Eksekutif FWI sebanyak 16 orang dengan komposisi kerja: kesekretariatan berjumlah 6 orang dan program berjumlah 11 orang (1 orang *part time*). Saat ini ada kekosongan untuk posisi manajer di Divisi Riset dan Pengembangan.

Perkembangan Jumlah Staf FWI



Badan Hukum dan Keanggotaan

Pada tanggal 14 Juli 2014 FWI secara resmi mengubah badan hukumnya dari Yayasan menjadi Perkumpulan, melalui akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dwi Sundjajik, SH, M.Kn. dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui SK. No.AHU-00314.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forest Watch Indonesia. Pertimbangan untuk merubah badan hukum organisasi FWI adalah untuk menjawab keabsahan badan hukum yayasan terdahulu dan memberikan wadah bagi setiap anggota untuk melakukan tindakan bersama. Sebagai organisasi berbasis anggota, maka keanggotaan Perkumpulan FWI pertama, sebanyak 21 anggota.

FWI melakukan pembaruan akta melalui Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dwi Sundjajik, SH, M.Kn pada tanggal 24 November 2015 terkait penambahan keanggotaan sebanyak 14 individu sehingga menjadi 35 anggota. Namun pada bulan Oktober 2017, FWI kehilangan seorang anggotanya, yaitu sdr. Arbi Valentinus, karena telah dipanggil oleh Sang Pencipta. Sehingga sampai saat ini, maka keanggotaan Perkumpulan FWI berjumlah 34 anggota.

Rapat Gabungan BP dan DP

Dalam rangka koordinasi serta evaluasi kinerja FWI sebagai sebuah organisasi, maka sangat penting dilakukan Rapat Gabungan Badan Pengurus (BP) dan Dewan Pengawas (DP). Forum ini bertujuan untuk menginformasikan capaian-capaian kerja, mendiskusikan hal-hal yang krusial serta menyusun rencana kerja yang akan datang sesuai dengan dinamika yang terjadi seperti yang diamanatkan di dalam Anggaran Rumah Tangga (Pasal 20). Forum ini sekaligus menjadi salah satu wadah komunikasi dalam kelembagaan organisasi FWI sehingga memungkinkan terjadinya sebuah interaksi yang membangun antara Badan Pengurus dan Dewan Pengawas FWI. Selama periode ini, Rapat Gabungan antara Badan Pengurus (BP) dan Dewan Pengawas (DP) telah dilaksanakan pada bulan Juli 2015, September 2016, Mei 2017, Juni 2018, Januari 2019 dan Oktober 2019.

Rapat Badan Pengurus

Rapat Badan Pengurus merupakan forum pengambil keputusan strategis menyangkut pengembangan keorganisasian, pencarian dana, merespon isu-isu strategis dan pembentukan alat kelengkapan Badan Pengurus, melalui badan-badan otonom, komisi-komisi dan badan usaha, sesuai pasal 21 Anggaran Rumah Tangga. Untuk menjalankan mandat tersebut, Badan Pengurus telah melakukan serangkaian rapat, baik melalui rapat yang telah dijadwalkan terlebih dahulu maupun secara spontanitas karena interaksi antar anggota badan pengurus yang intens. Beberapa keputusan yang diambil, seperti:

1. Merotasi kepemimpinan di Sekretariat FWI
2. Menentukan strategi advokasi FWI dan jaringan-nya dalam isu keterbukaan informasi dan isu-isu strategis lainnya
3. Mengembangkan strategi pencarian dan penggalangan dana organisasi
4. Menyusun program kerja strategis dan merumuskan rencana kerja tahunan
5. Menginternalisasi isu gender dalam kegiatan dan publikasi FWI
6. Meningkatkan kapasitas teknis staf eksekutif

Badan Pengurus dengan Anggota

Untuk memfasilitasi komunikasi dengan anggota, maka sekretariat FWI telah menyediakan sebuah milis (FWI BOGOR) dan group *WhatsAPP*. Walaupun demikian harus diakui bahwa interaksi dan komunikasi yang terbangun belum dapat dikatakan optimal. Harus diakui bahwa salah satu penyebabnya karena Badan Pengurus masih kurang proaktif untuk mengajak seluruh anggota untuk berkontribusi dalam mengimplementasikan program kerja dan belum dilakukan secara terstruktur dan terlembaga di dalam Komisi-Komisi. Keterlibatan anggota sejauh ini masih bersifat isidental, seperti keterlibatan di dalam keproyekan, studi, kegiatan *fundrasing* dan peningkatan kapasitas staf eksekutif, beberapa diantaranya: A. Ruwindrijarto, Abdon Nababan, Paramita Iswari, Bambang Tetuka, Yuyun Indradi, Putra Agung, dll. Terakhir, Badan Pengurus dan sekretariat FWI terlibat dan membantu proses penyusunan dan penerbitan buku (Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan) yang merupakan karya dari anggota FWI (Prof. Hariadi Kartodihardjo).

PERKEMBANGAN PROGRAM KERJA FWI

Untuk melaksanakan program kerja yang telah dimandatkan, FWI membungkusnya dengan tema: **Memimpin perbaikan tata kelola kehutanan melalui gerakan keterbukaan informasi kehutanan dengan menyediakan data dan informasi alternatif yang tidak terbantahkan.** Pemilihan tema ini dirumuskan di dalam rapat kerja Badan Pengurus dan eksekutif dan kemudian dikonsultasikan melalui Rapat Gabungan Badan Pengurus (BP) dan Dewan Pengawas (DP).

Isu keterbukaan informasi masih menjadi roh dari kerja-kerja FWI. Pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyediakan peluang advokasi yang lebih maju, namun bukan tanpa hambatan. FWI harus bisa memerankan diri agar iklim keterbukaan membaik, untuk memastikan perbaikan tata kelola kehutanan bergerak maju, menjadi langkah pertama untuk mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan kehutanan yang terbuka, adil dan lestari.

Pengembangan pangkalan data serta fungsi-fungsi pemantauan untuk memperoleh informasi-informasi terkini kondisi hutan alam, akan tetap dilakukan. Kemudian untuk menopang kerja kampanye dan advokasi keterbukaan informasi, FWI kembali meningkatkan fungsi layanan informasi, sebagai alternatif informasi kehutanan bagi masyarakat sipil, jurnalis, akademisi termasuk para pengambil kebijakan di Indonesia maupun di pihak-pihak luar.

Posisi FWI saat ini didasarkan pada prasyarat pemungkin dalam terwujudnya **tata kelola hutan dan lahan yang baik (*good forest and land governance*)**, yaitu mendorong prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan ataupun implementasinya, penegakan hukum dan pencegahan korupsi serta kepastian wilayah. Prasyarat pemungkin ini kemudian diturunkan dalam 7 area kerja seperti:

1. Penguatan kelembagaan pengelola hutan di tingkat tapak (KPH)
2. Penghentian ekspansi HTI dan sawit
3. Penyelamatan hutan alam di pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Pengembalian fungsi hutan sebagai bagian dari daerah tangkapan air
5. Penyelamatan gambut dan mangrove
6. Monitoring illegal logging dan konversi illegal; dan
7. Perluasan hak dan akses masyarakat melalui wilayah kelola masyarakat

Hal lain, Isu keadilan gender sendiri terinternalisasi dalam ketujuh isu tersebut.

Sedangkan untuk aktivitas kampanye dan advokasi, ada beberapa instrumen yang digunakan oleh FWI dalam memainkan peran tersebut, seperti instrumen legalitas dan kelestarian (SVLK, ISPO, Ekolabel, dll), instrumen pengakuan wilayah adat dan Perhutanan Sosial; serta instrumen untuk restorasi ekosistem, seperti: Mangrove, Gambut dan Ekosistem Esensial. Posisi FWI tersebut digambarkan melalui grafis berikut ini:



Gambar 1. Tujuan dan Target Program Kerja

Pada tahun 2017, FWI membungkus isu-isu yang diusung dengan pesan kampanye #stopdeforestasi, Tidak terbatas hanya di lima isu utama, namun FWI juga turut andil dalam isu lainnya seperti wilayah kelola masyarakat (adat dan lokal), korupsi, gambut, moratorium, ISPO, dan lain sebagainya. Kesetaraan gender menjadi bagian dari kerja FWI sebagai *cross cutting issue* pada kegiatan-kegiatan yang berkembang.

Kemudian pada bulan Desember tahun 2018, FWI mulai menyusun program strategis tahun 2019 – 2021, sebagai upaya untuk melanjutkan pencapaian-pencapaian pada periode kerja sebelumnya. FWI mengidentifikasi secara mandiri kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki ataupun yang dihadapi oleh FWI.

Termasuk untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari hasil Evaluasi Kinerja Program yang dilakukan oleh Dala Institute sejak pertengahan tahun 2018. Institusi tersebut merupakan salah satu lembaga konsultan yang digunakan oleh RFN untuk mengevaluasi organisasi FWI khususnya dalam pelaksanaan program FWI-RFN di bioregion Papua.

Disarikan dari hasil kajian dari Dala Institute, kekuatan kunci yang dimiliki FWI adalah keterampilan dalam memproduksi data dan informasi melalui pemetaan spasial menggunakan citra satelit sebagai landasan yang kuat dalam mengangkat isu-isu kehutanan. Kekuatan FWI lainnya dibangun di atas pengalaman pada penelitian tindakan (*action research*) dan advokasi berbasis data untuk menyampaikannya dengan cara yang dapat dan mudah dipahami publik. Selain itu, FWI juga memiliki jaringan luar biasa anggota yang memiliki latar belakang terkemuka meskipun belum didayagunakan secara optimal. FWI juga sangat fleksibel dan memiliki keberanian untuk mengambil risiko tinggi di dalam bekerja. Kekuatan kunci ini berguna ketika FWI bekerja di daerah-daerah di mana tekanan politik dan keamanan sangat kuat.

Periode tahun 2019 ini, FWI kembali menyusun sebuah pesan #SudahCukup untuk mendukung kerja-kerja kampanye dan advokasi yang akan dijalankan. Kata “SudahCukup” merupakan representatif dari

kondisi dan berbagai macam permasalahan hutan Indonesia saat ini. Dimana, deforestasi (kehilangan hutan) terus terjadi dengan laju yang semakin meningkat. Belajar dari pengalaman yang sudah terjadi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, maka sangatlah logis jika kata “#SudahCukup” menjadi pesan utama dalam upaya menyelamatkan hutan tersisa di Indonesia. Goal Utama yaitu adanya tekanan publik untuk menyelamatkan hutan tersisa di Indonesia dan berdampak pada komitmen, perubahan kebijakan, dan pola pikir dalam pengelolaan sumber daya alam.

Target:

1. Dukungan dari masyarakat perkotaan yang peduli dengan hutan di Indonesia: narasi tentang pentingnya hutan untuk kehidupan.
2. Dukungan dari masyarakat yang hutannya telah habis: Narasi tentang pengalaman terkait dampak hilangnya hutan.
3. Dukungan dari masyarakat yang hutannya sedang terancam: Narasi terkait permasalahan dan ancaman di setiap lokasi.
4. Dukungan dari masyarakat yang hutannya masih terjaga: Narasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penghancuran hutan.

Kampanye turunan dari #SudahCukup adalah #SudahCukupLuasnya, #SudahCukupBencananya, #SudahCukupKorupsinya, #SudahCukupTertutupnya, #SudahCukupKonfliknya dan #SudahCukupDiamnya.

PROGRAM KERJA DAN CAPAIAN

Program kerja periode Juli 2015-Desember 2019 serta capaiannya sebagai berikut :

No	Program Kerja 2015-2019	Sub Program	Juli 2015	2016	2017	2018	2019
1	Adanya data dan informasi kehutanan yang terbaharui, terstruktur, dan akurat melalui acuan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan	1.1. Memperbarui konsep pangkalan data FWI untuk mengintegrasikan data spasial dan non spasial.	Draf Konsep pangkalan data	Konsep pangkalan data tematik & detail	Draft metodologi peta indikatif wilayah adat	a. Metodologi Peta Indikatif Wilayah Adat, b. Draft modul penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk mendayagunakan informasi publik	a. Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil Untuk Mendayagunakan Informasi Publik Sektor Kehutanan Dalam Kerangka Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Hutan b. Modul Identifikasi Indikasi Kawasan Ekosistem Esensial di Indonesia
		1.2. Membangun sistem layanan data dan informasi yang sederhana.	Draf SOP Management DATA	SOP Management Data	Dokumen layanan data		
		1.3. Penyiapan sumberdaya yang dibutuhkan	Empat (4) orang volunteer entry data	Tim developer bukapeta	Tim developer bukapeta		
		1.4. Membangun pangkalan data tematik		Dummy Database	a. Server lokal olah data: https://9.9.9.9:5001/ b. Perpustakaan: www.perpustakaan.fwi.or.id	Portal pemantauan DTA: www.hutanciliwung.id	

					<ul style="list-style-type: none"> c. Peta Hutan: www.petahutan.fwi.or.id d. Sistem informasi untuk klipang media menggunakan microsoft access 	
	1.5. Mengelola data dan informasi kehutanan secara berkala		<ul style="list-style-type: none"> a. 227 RKU IUPHHK-HA, b. 145 peta IUPHHK-HA c. List 85 perusahaan IPK d. 200 RKU IUPHHK-HTI e. 123 dokumen RPBB tahun 2014 f. 143 dokumen RPBB tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> a. Katalog data peta tumpang tindih b. Data kehutanan update sampai tahun 2016 c. Baseline data spasial dan non spasial 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data spasial kehutanan update sampai tahun 2017 b. Katalog citra c. Peta Deforestasi 3 Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peta Tutupan Hutan Indonesia Tahun 2017 b. Peta Deforestasi Hutan Indonesia Tahun 2013-2017 c. Data HGU beserta peta d. Data hutan papua tahun 2018 e. Peta hutan papua f. Peta Identifikasi Indikasi KEE
2	Adanya hasil pemantauan kondisi kerusakan hutan alam, aktivitas para pelaku kejahatan hutan, maupun mempromosikan model pengelolaan hutan yang adil dan lestari, yang terpublikasi dengan baik.	2.1. Pemantauan kondisi hutan dan deforestasi hutan alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi: Pemantauan deforestasi di Kalimantan Timur, Riau dan Sumut b. Film deforestasi di 3 Provinsi 	Outline PKHI 2014 - 2017	Draft PKHI 2014 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Draft Final PKHI 2014 – 2017 b. Buku deforestasi tanpa henti; c. Film tentang deforestasi d. Press release deforestasi
2.2. Pemantauan pengelolaan sumberdaya alam di pulau-pulau kecil dan Papua		Draft Analisis valuasi ekonomi di Pulau Aru	Analisis valuasi ekonomi di Pulau Aru	Buku Potret Karst Kepulauan Aru Maluku, Indonesia	Draft Potret Papua	Draft Final Potret Papua
2.3. Pemetaan stakeholder (CSO & Pemerintah) untuk pemantauan illegal logging		Kajian pemetaan stakeholder (di SurveyMonkey)				

		2.4. Kajian dan pemantauan tata ruang terutama terkait dengan pengelolaan DTA		Draft Buku Potret DAS Ciliwung-Cisadane	Draft factsheet potret DAS ciliwung Cisadane	<ul style="list-style-type: none"> a. Draft factsheet Pengelolaan DAS di Jawa Barat b. Factsheet Tata Ruang kawasan Puncak c. Rilis perlindungan kawasan lindung puncak d. Film singkat banjir akibat daya dukung Puncak yang menurun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Petisi change.org tentang stop pembangunan resort di CA Telaga Warna b. Laporan Pengaduan ke Gakkum pembangunan resort di CA Telaga Warna
		2.5. Riset aksi penyelamatan DTA dan cadangan karbon dari hutan alam melalui peningkatan partisipasi para pihak				<ul style="list-style-type: none"> a. Nota Kesepahaman Bersama Pemerintah, CSO dan Perusahaan ttg Pemulihan Ekosistem Kawasan Puncak sebagai Hulu DAS Ciliwung b. MoU soal rehabilitasi lahan seluas 200 Ha (152 Ha di gunung mas & sisanya di PT PTPN VIII & PT. SSBP) c. Press release terkait Memerdekakan Tanah dan Air d. Film singkat “Memerdekakan Tanah dan Air” 	Penyelamatan DTA dan cadangan karbon dari hutan alam tersisa melalui peningkatan partisipasi para pihak yang terbuka
		2.6. Kajian dan analisis keuangan dan pemantauan HTI dan kilang Pulp Paper		<ul style="list-style-type: none"> a. Draft Kajian Kredit Permodalan Untuk Investasi Perusahaan Pengrusak Sumberdaya Hutan Studi Kasus HTI b. Data spasial areal yang berhutan dan <i>land clearing</i> HTI di 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kajian Kredit Permodalan Untuk Investasi Perusahaan Pengrusak Sumberdaya Hutan Studi Kasus HTI (unpublished) b. Laporan pemantauan HTI dan kilang pulp 		Data spasial areal yang berhutan dan <i>land clearing</i> di HTI

			provinsi sumatera utara, dan riau	yang berada di provinsi Sumatera utara, dan Riau		
	2.7. Kajian untuk advokasi pembangunan Kelapa Sawit & <i>smallholder</i> dan ISPO untuk mencegah deforestasi		a. Draft buku ISPO b. Draft Laporan Kajian perkembangan perkebunan sawit di Kalimantan	a. Buku 6 Tahun ISPO b. Laporan Kajian perkembangan kelapa sawit di Kalimantan	Roadmap CSO Advokasi Perkebunan Kelapa Sawit	Tersusunnya Roadmap CSO Advokasi Perkebunan Kelapa Sawit 2017-2022
	2.8. Kajian tumpang tindih perizinan, alokasi ruang pemanfaatan dan pemetaan wilayah kelola rakyat		a. Laporan riset tumpang tindih perizinan dan alokasi ruang di Muara Lambakan b. Peta wilayah adat Long Bagun	Peta wilayah adat Muara Tae Kalimantan Timur		a. Buku Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan b. Film silang sengkarut; c. Press release silang sengkarut
	2.9. Kajian penguatan implementasi SVLK	Publikasi FWI-JPIK: Celah Dalam Legalitas (<i>Loopholes in Legality</i>)	a. 2 Newsletter JPIK b. Laporan keluhan kepada lembaga auditor/KAN/KLHK			
	2.10. Melakukan assesmen kinerja pembangunan KPH		Laporan Pemantauan di KPHL XXX Kalimantan Timur	Laporan Assesmen 3 KPH (Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah)		a. Buku terkait penilaian kinerja pembangunan KPH FWI 2.0 b. Policy brief dampak UU 23 terhadap pembangunan KPH; c. Factsheet pemantauan KPH di 3 lokasi

		2.11. Kajian dan perlindungan mangrove di Teluk Balikpapan membangun jaringan				<ul style="list-style-type: none"> a. Infografis Mangrove b. Policy Brief sebaran mangrove di Indonesia c. Factsheet bersama Jaringan Jangkar Mangrove 	
3	Adanya perubahan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh aktivitas pemantauan FWI	3.1. Melakukan kampanye dan advokasi revisi PermenLHK No. 95 tahun 2014 terkait Penilaian Kinerja PHPL & VLK dan Perdirjen BUK No. 14 tahun 2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan VLK	Rilis: Ketidapatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut	PermenLHK No. 30/2016 dan Perdirjen PHPL No. 15/2016 yang memperkuat hak dan peran pemantau independen (akses informasi, keselamatan dan dukungan pendanaan)			
		3.2. Melakukan advokasi keterbukaan informasi, melalui upaya uji akses informasi, kampanye lanjutan, advokasi dan mengupayakan revisi peraturan Permenhut dan Permen LH		<ul style="list-style-type: none"> a. Draft revisi peleburan kebijakan antara P.7/2011 dengan P.6/2011 b. Rilis: Urgensi Keterbukaan Dokumen Perizinan Sektor Hutan & Lahan c. Briefing paper Keterbukaan Informasi Publik Atas Dokumen Perizinan Investasi Berbasis Hutan dan Lahan d. Rilis: Keterbukaan Informasi Publik Harus Diikuti oleh 		Pada tanggal 28 Mei 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkup KLHK.	

				Kementerian/Lemba ga di Sektor SDA e. Policy brief Inisiasi Keterbukaan Informasi SDA Di Sektor Kehutanan: Pentingnya Peran Kementerian/ Lembaga Lintas Sektor		
	3.3. Melakukan advokasi keterbukaan informasi, melalui upaya uji akses informasi, kampanye lanjutan, advokasi dan mengupayakan revisi peraturan ATR/BPN	Dokumen argumentasi FWI-BPN- Sidang KIP	<ul style="list-style-type: none"> a. Putusan KIP yang menyatakan HGU adalah informasi publik b. Dokumen argumentasi FWI vs BPN – PTUN c. Putusan PTUN yang menguatkan Putusan komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016 d. PerMenATR/BPN Nomor 7/2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Pasal 61) 	Putusan Kasasi MA yang menolak permohonan kasasi Kemen ATR/BPN	<ul style="list-style-type: none"> a. Petisi: 53 ribu dukungan #bukainformasiHGU di change.org/bukainformasiHGU b. Laporan Pengaduan ke ORI - RI c. Rilis dgn change.org: Puluhan ribu orang yang menuntut Menteri Sofyan Djalalil mematuhi hukum Film dokumenter Aku Berhak Tahu; d. Lagu (OST) kampanye "Aku Berhak Tahu e. Aksi di Kemen ATR/BPN 	<ul style="list-style-type: none"> a. Petisi: 61 ribu dukungan #bukainformasiHGU di change.org/bukainformasiHGU b. Rekomendasi ORI yang meminta Kemen ATR/BPN untuk menyusun mekanisme pemberian dokumen HGU ke FWI c. FWI bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi HGU Mengadukan Menteri ATR/BPN ke Bareskrim Mabes POLRI
	3.4. Melakukan advokasi sistem dan standar sertifikasi sawit berkelanjutan & RUU Perkelapasawitan				Dokumen kebijakan versi CSO terkait perbaikan sistem dan standar sertifikasi ISPO	

		3.5. Melakukan advokasi RUU Pertanahan				Catatan Kritis terhadap RUU Pertanahan	
4.	Penyusunan produk produk FWI yang dapat menjadi rujukan para pihak	4.1. Menerbitkan produk-produk FWI yang berisikan data dan informasi alternatif yang berkualitas sebagai rujukan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan.	1 buletin intip Hutan	1 buletin Intip Hutan 1 satu rilis terkait keterbukaan informasi badan publik 1 film keterbukaan informasi publik	1 buletin intip hutan 1 policy brief KIP 1 policy brief HGU 1 Policy Brief UU 23 tahun 2014 terhadap KPH	1 buletin Intip Hutan "Hutan untuk Air" Buku Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: 73 Esai-Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahuan, Politik Sumber Daya Alam & Problematika Kebijakan	
		4.2. Mengemas data dan informasi alternatif kehutanan menjadi sebuah publikasi yang menarik.		17 infografis	2 film pendek DTA, 1 film banjir, film pendek mangrove Teluk Balikpapan	8 Film diproduksi selama 6 bulan, Grafik analisis trend media	6 Film diproduksi, 4audio, 1 live streaming
		4.3. Menyebarkan publikasi kepada para pemangku kepentingan di sektor kehutanan		Analisis hasil kliping media hasil tahun 2016	a. Analisis hasil kliping media hasil tahun 2017 b. Peningkatan followers twitter menjadi 1625, facebook fanspage menjadi 2775	a. Analisis hasil kliping media hasil tahun 2018 b. Desiminasi publikasi FWI ke sekolah dan kampus c. Peningkatan followers twitter menjadi 1997, Facebook fanspage menjadi 3468, youtube 558 subscriber d. Bedah Buku Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: 73	a. Analisis kliping media hasil tahun 2019 b. Fansfage facebook FWI 3.837 likers, Twitter memiliki 2.604 pengikut, dan instagram memiliki 4336 pengikut. Sementara youtube FWI memiliki 1.770 subscriber

						Esai-Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahuan, Politik Sumber Daya Alam & Problematika Kebijakan	c. Bedah Buku Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: 73 Esai-Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahuan, Politik Sumber Daya Alam & Problematika Kebijakan
		4.4. Pengelolaan website dan portal pemantauan online		Laporan pantauan hasil analisis perkembangan website FWI	Laporan pantauan hasil analisis perkembangan website FWI	Laporan pantauan hasil analisis perkembangan website FWI	
5	Mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik	5.1. Melakukan kerja berjangkaran untuk mempermudah kerja-kerja FWI	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Tata Kelola dan Pokja Tata Kelola Hutan b. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Koalisi Penyelamatan Hutan dan Perubahan Iklim b. Konsorsium Penyelamatan Puncak c. Badan Registrasi Wilayah Adat. d. Kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Timur, NTB, Papua dan Riau dalam melakukan uji akses 	<ul style="list-style-type: none"> a. Koalisi Penyelamatan Pulau Kecil b. Gerakan Mahasiswa/pemuda DTA c. Jangkar Mangrove d. Koalisi Moratorium Hutan e. Koalisi Advokasi Perkelapasawitan f. Koalisi Gerakan keterbukaan informasi 		MoU dengan Universitas Pattimura untuk Penyelamatan Biodiversity Wallacea dan Pulau-Pulau Kecil
		5.2. Memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah dan CSO		a. Bantuan teknis kepada pemerintah provinsi untuk penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ttg layanan informasi publik di Prov.			

				<p>Kalimantan Tengah dan Kab. Lombok Timur</p> <p>b. Pelatihan bagi komunitas puncak dalam menggunakan GPS dan investigasi</p> <p>c. Pelatihan bagi CSO KPH dan metode pemantauan</p>			
		<p>5.3. Mengadakan kegiatan untuk menjangkau dukungan publik terhadap kampanye FWI, seperti: talkshow, event, lomba penulisan populer, lomba foto, lomba video</p>		<p>a. Pemutaran film patani</p> <p>b. Lomba Film Pohon</p> <p>c. Esai & Foto Keterbukaan Informasi & Tata Kelola Hutan</p> <p>d. 5 kali diskusi publik</p>	<p>a. Event ForEXPO, Jaringan dengan komunitas musik, sastra, teater dan tari</p> <p>b. Grafik analisis trend media</p>	<p>a. Jaringan dengan RRI, Lesmana</p> <p>b. 5 film pendek tentang puncak</p> <p>c. Liputan Live 17 Agustus saat Aksi Memerdekakan Kawasan Puncak</p> <p>d. Pembuatan film dokumenter</p> <p>e. Peliputan ttg Kaw. puncak dengan DAAITV</p> <p>f. Pembuatan program investigasi dengan RTV</p>	
		<p>5.4. Meningkatkan interaksi dengan media massa dan analisis isu yang berkembang baik secara offline maupun online</p>		<p>Press conference satu kali mengenai keterbukaan informasi</p>			<p>Press conference satu kali mengenai Kondisi Hutan dan Deforestasi</p>
		<p>5.5. Memperkuat citra FWI sebagai lembaga penyedia</p>				<p>a. 9 press release</p> <p>b. Tulisan dari kontributor Kelas</p>	

6.	SDM dan kelembagaan FWI yang kompeten untuk mewujudkan perbaikan tata kelola kehutanan	data dan informasi alternatif yang berkualitas di sektor kehutanan				Hutan "Menulis Feature"		
		5.6. Mengubah wajah FWI sebagai organisasi yang ramah terhadap kalangan muda			Ngaso	a. Kelas Hutan Perdana b. Kelas Hutan ke dua c. Kelas Hutan "SUsur Ciliwung" d. Ngaso e. Volunteer dari kelas hutan	Ngaso	
		6.1. Peningkatan kapasitas staff FWI dalam pemahaman isu kehutanan	3 kali diskusi reguler Isu. staff program memahami isu DTA, HTI dan tata kelola hutan					
		6.2. Menyelesaikan adendum akte perkumpulan terkait keanggotaan dan kepengurusan periode 2015-2018 perkumpulan FWI	Adendum akte Perkumpulan FWI					
		6.3. Menyelesaikan proses jual beli dan sertifikat rumah di Jalan Sempur Kaler No.62 Bogor	sertifikat rumah					
		6.4. Mengembangkan strategi penguatan organisasi dan sumber-sumber pendanaan perkumpulan, yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan sukarela, pendanaan yang terikat maupun yang tidak terikat	12 orang anggota membayar iuran anggota				1 anggota membayar iuran anggota	

	6.5. Menyelenggarakan acara dan berbagai tradisi organisasi, meliputi perayaan ulang tahun FWI, Pertemuan Anggota Tahunan, Rapat Gabungan Badan Pengurus dan Dewan Pengawas	1 kali Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas 1 Renstra FWI	1 kali Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas 1 Raker FWI	1 kali Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas 1 Raker FWI	1 kali Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas 1 Renstra	2 kali Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas 1 Raker Sarasehan dan Refleksi 20 tahun FWI
	6.6. Melaksanakan audit independen, baik keuangan maupun pengelolaan perkumpulan secara rutin setiap tahun.	Laporan Audit 2015			Laporan Audit 2016, 2017	Laporan Audit 2018
	6.7. Membentuk alat kelengkapan kerja Badan Pengurus FWI, yaitu Komisi-Komisi dan pembentukan badan usaha FWI dalam bentuk Koperasi dan Perusahaan Terbatas.		Surat izin badan usaha "PT. Fajar Wana Indonesia"			
	6.8. Menyusun rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja perkumpulan setiap tahun	Rncana kerja dan anggaran 2015-2016	Rencana Kerja dan Anggaran 2016-2017	Rencana Kerja dan Anggaran 2017-2018	Rencana Kerja dan Anggaran 2018-2019	Rencana Strategis 2019-2022

		6.9. Meningkatkan kapasitas teknis sumberdaya manusia (SDM) FWI dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta publikasi.		Ada 2 staf yang dapat mengoperasikan WTA, baik teknis dan pilot			
--	--	---	--	---	--	--	--

Analisis Wacana Kampanye dan Intervensi Kebijakan

Pada tahun 2018, FWI juga melakukan analisis wacana terkait sejauh mana capaian perubahan dari kampanye dan intervensi kebijakan yang sudah dilakukan untuk isu keterbukaan informasi publik dalam tiga tahun terakhir.

Argumen Tanding	Simpati	Empati	Komponen Perubahan		
			Peraturan	Aktor	Praktik
		<ul style="list-style-type: none"> Hampir 54 ribu dukungan untuk #BukaInformasi GP Indonesia, Perdu Papua, BUMI Kaltim, Walhi Kalteng, GeRak Aceh, melakukan kampanye yang sama Akademisi (DGB-IPB) turut serta mendukung dengan rencana membuat konferensi Pers 	<ul style="list-style-type: none"> PerMenATR/BPN Nomor 7/2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Pasal 61) PerMenLHK Nomor 18/2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik oleh KLHK Putusan MA terkait Keterbukaan HGU Putusan PTUN terkait Keterbukaan RKT, RKU, IPK, RPBBI Surat Edaran Keterbukaan Informasi RKT,RKU,IPK,RPBBI oleh KLHK. Surat Edaran KI Riau Keterbukaan RKT,RKU,IPK,RPBBI dan HGU. 	Ada SDM Pelayanan Informasi di KLHK	<ul style="list-style-type: none"> KLHK Sudah Merespon setiap permohonan informasi, meski lama dan mengulang/tidak konsisten ATR/BPN Sudah Merespon setiap permohonan informasi, meski Informasi tidak diberikan juga

Adapun jejaring dan Mitra FWI dalam kolaborasi melakukan kerja-kerja pemantauan dan advokasi dalam setiap tematik, terlampir dibawah ini:

Tabel 3. Jaringan dan Mitra

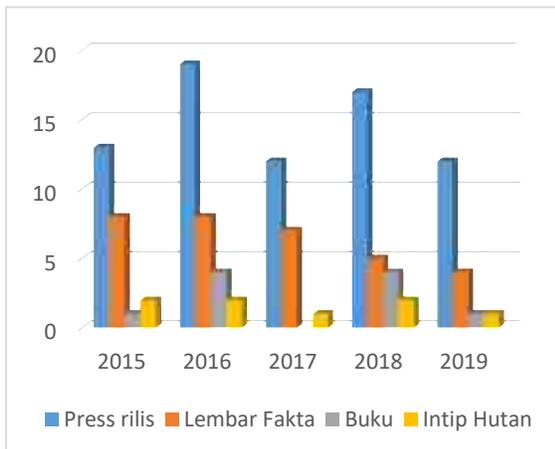
NO	TEMATIK	MITRA
1.	Ekspansi IUPHHK-HT terhadap hutan alam	<ul style="list-style-type: none"> • YMI - Riau • KSPPM – Sumut • Mitra CLUA
2.	Daerah Tangkapan Air	<ul style="list-style-type: none"> • Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak (FWI, P4W , Kaoem Telapak, Yayasan Rekam Nusantara) • Forum Bencana Kabupaten dan Kota Bogor • DAAITV
3.	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Stabil - Kaltim • RoA - Sulteng • GIZ, Sampan, Untan – Kalbar • Mitra Setapak 2 Regional Aceh, Sumbar, Sumsel, Riau, Sumut, Sulsel, Kaltim, Papua, Papua Barat) • Universitas Mataram • Universitas Lancang Kuning • IPB
4.	Penyelamatan Hutan Alam di Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM P4W-IPB • AMAN Malut • Save Aru • AMAN • Yayasan Rekam Nusantara • If Not Us Then Who • JATAM Nasional • KIARA • LIPI
5.	Sistem Informasi Legalitas Kayu (SVLK)	<ul style="list-style-type: none"> • JPIK • Kaoem Telapak
6.	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan (FWI, P3SEKPI, ICEL, DKN, Dessy Eko P, FOINI) • Jaringan Tata Kelola Hutan (DKN, P3SEKPI, UNDP, Gema Alam NTB, JARI KALTENG, ICEL) • Koalisi Open Government Indonesia (FWI, TI, FOINI, ICEL, TUK) • FOINI • FORCI
7.	Moratorium Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Perubahan Iklim Global (FWI, Huma, AMAN, Walhi) • Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (FWI, ARuPA, FKKM, FPPK, FPPKS, FWI, HuMa, Javlec, JPIK Jateng, Karsa, Kompleet, KpSHK, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, Lidah Tani, LPH Yaphi, LPPSLH, Ortaja, Paguyuban Petani Turi, Paramitra, PPHJ, PPLH Mangkubumi, RMI, Rumah Aspirasi Budiman, SD INPERS, Sepkuba, SPP, SPPT, Stan Balong, Suphel, Telapak, Walhi DIY, Walhi Jabar, Yayasan Koling, Yayasan Sitas Desa, Yayasan Trukajaya, LBH Yogyakarta, dan Epistema • Koalisi Anti Mafia Tambang dan Sawit (FWI, YLBHI, ICW, WALHI, ICEL, JIKALAHARI, TII, SENARAI, JATAM)
8.	Perkelapasawitan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan (SPKS, LEI, JPIK, Madani, Kaoem Telapak, Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia, Greenpeace, Institut

		<p>for ecosoc Rights, ICEL, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, PPLH Mangkubumi, JAPESDA, GRID Kalimantan Barat, LPMA Borneo Selatan, Kemitraan, GAIA, TFF, Padi Indonesia Kalimantan Timur, JASOIL Papua Barat, UNO ITAM Aceh, LTB Jambi, Evergreen Sulteng, Jikalauhari, PENA, QBAR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penguatan ISPO (Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) – Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)- Forest Watch Indonesia (FWI) – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Kaoem Telapak – Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia – Greenpeace Indonesia – Yayasan Madani Berkelanjutan – Institute for Ecosoc Rights – GAIA – Tropical Forest Foundation (TFF) -Padi Indonesia, Kalimantan Timur – Jasoil, Papua Barat – Uno Itam, Aceh – Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi – Evergreen, Sulawesi Tengah – Yayasan Pusaka – Sayogyo Institute – Indonesia Center for Environmental Law – Kemitraan – GeRak Aceh – Stabil Kalimantan Timur – MATA Aceh – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan – PPLH Mangkubumi – JAPESDA Gorontalo – GRID Kalimantan Barat – LPMA Borneo, Kalimantan Selatan – Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), Aceh – Jikalauhari, Riau, Komnasdesa-Sultra) • Kelompok Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan LH
9.	Wilayah Kelola Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • GDN • BRWA • Tim Pendamping Muara Tae
10.	Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> • Jangkar Mangrove (Yayasan Hutan Biru, JAPESDA, Forum Peduli Teluk Balikpapan, Perkumpulan Sampan, Yayasan Mitra Insani)
11.	Korupsi SDA	<ul style="list-style-type: none"> • GNPSDA KPK Korsup Hutbun • PAH DGB-IPB
12.	Pemanfaatan Wahana Tanpa Awak (WTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Hub WTA Nasional • WTA Bogor

Media dan Komunikasi

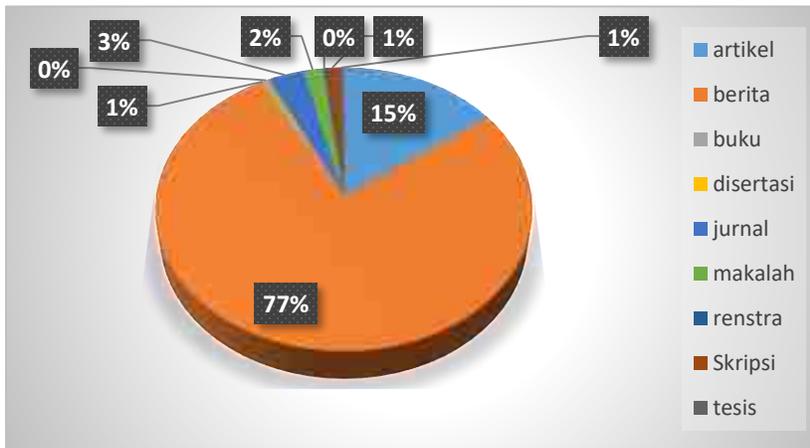
Produk dan acara yang diproduksi oleh FWI tidak hanya disebarluaskan kepada publik, tapi juga dapat mendorong publik, yakni kalangan CSO, akademisi, environmentalist, dan masyarakat umum secara luas untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terhadap isu-isu kampanye yang diusung oleh FWI. Produk-produk yang dihasilkan berupa data dan informasi yang dikemas secara menarik agar mampu menjangkau publik yang lebih luas. Sementara kegiatan yang diselenggarakan melibatkan seluas-luasnya komunitas masyarakat.

Publikasi



Publikasi dalam berbagai rupa merupakan salah satu metode advokasi yang dipilih FWI. Selain berita-berita yang dimuat di website FWI, berikut beberapa hasil kerja FWI yang dipublikasikan antara 2015-2019:

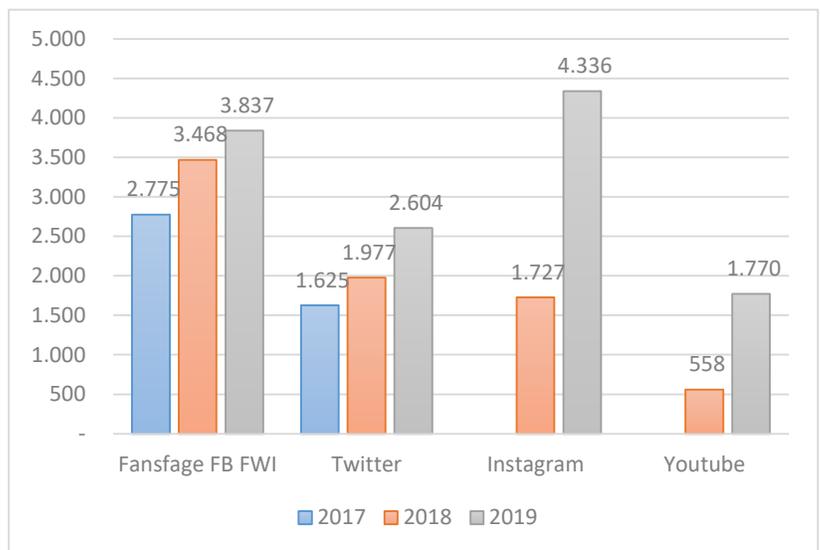
Selama periode 2015-2019, publikasi FWI mencapai 123 publikasi yang terdiri dari press rilis, lembar fakta, Buku dan Buletin Intip hutan (Lampiran 1). Selain publikasi tersebut FWI mencoba mengemas publikasi yang lebih simpel dan menarik bagi publik yaitu infografis, poster, film pendek dan publikasi lainnya.



Dari publikasi yang dikeluarkan FWI dari tahun 2015-2019 yang berhasil tercatat telah menggunakan publikasi FWI sebagai rujukan sebanyak 448 pengguna. **Lampiran 2.**

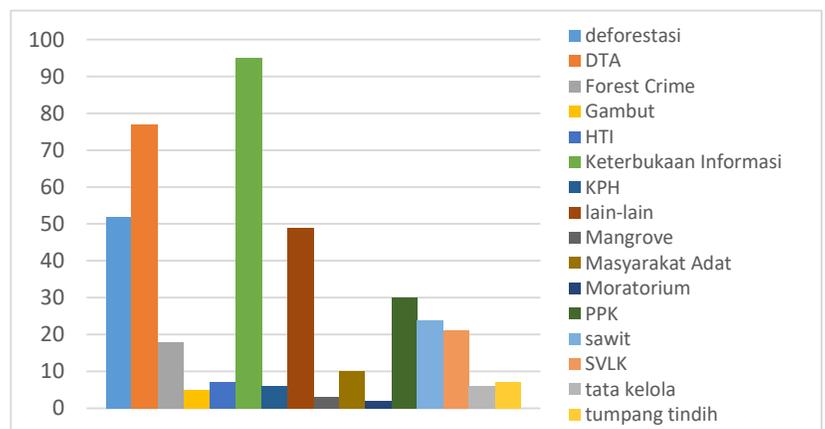
Selama periode ini pula, FWI melakukan terobosan-terobosan terbaru yaitu “Edukasi & Kampanye Kreatif Melalui Kegiatan Rutin”. Edukasi dan kampanye kreatif yang dilakukan dalam bentuk diskusi rutin dan diberi nama Ngaso dan Kelas Hutan.

Jangkauan media sosial FWI dari periode 2017-2019 terus berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2015-2016, FWI belum melakukan analisis sosial media secara rutin. Kemudian pada tahun 2017, FWI melakukan analisis sosial media fansfage facebook dan Twitter. Akun sosial media instagram dan Youtube baru memulai optimalisasi di tahun 2018 sampai saat ini. Pada Desember 2019 halaman media sosial FWI telah mencapai angka 3.837 likers, Twitter @fwindonesia memiliki 2.604 pengikut, dan instagram @pemantauhutan memiliki 4336 pengikut. Sementara youtube FWI memiliki 1.770 *subscriber*.



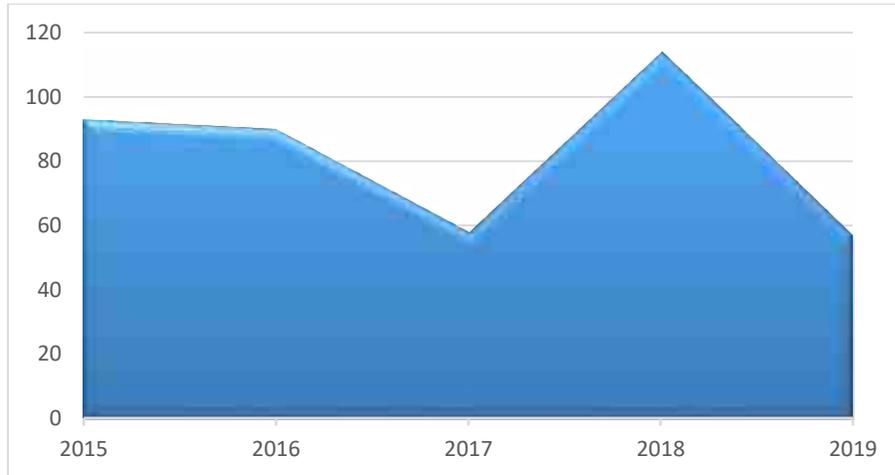
Kliping Media

Kliping Media telah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan saat ini. Dari hasil kliping media terdapat beberapa informasi yang digunakan FWI sebagai bentuk pertimbangan dalam pengambilan strategi advokasi, evaluasi efektifitas kampanye, perluasan wawasan internal FWI, dan pengayaan database liputan media terkait isu-isu lingkungan khususnya pada sektor hutan dan lahan.



Grafik analisis isu kliping media yang disajikan di bawah ini merupakan hasil kliping media selama Juli 2015- 2019, yang diambil dari media daring dan cetak. Selama periode ini tiga isu utama FWI mendominasi sektor pemberitaan mengenai Keterbukaan Informasi, DTA dan Deforestasi.

Publikasi-publikasi yang dilempar kepada publik dan ditangkap oleh media. FWI berkontribusi terhadap pemberitaan lingkungan yang terdapat di media online. Berikut adalah grafik pemberitaan FWI di media online dari tahun 2015-2019.



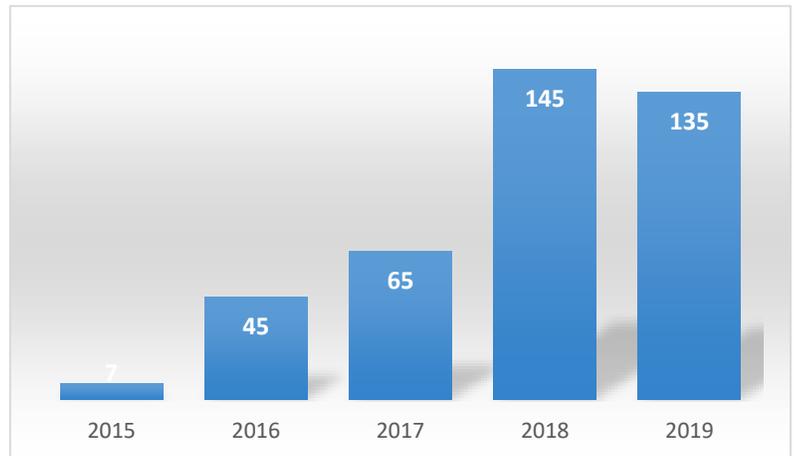
PENGEMBANGAN BADAN USAHA

Pengurusan badan usaha FWI telah dilakukan sejak bulan September 2015. Dan sejak bulan Mei 2016, seluruh kelengkapan izin badan usaha untuk bisa beroperasi sudah selesai. Badan Usaha yang didirikan dengan nama PT. Fajar Wana Indonesia, bergerak dibidang kehutanan dengan spesifikasi jasa dan konsultasi. Beberapa dokumen kelengkapan badan usaha PT Fajar Wana Indonesia antara lain: SKDU, Akte Pembentukan Perusahaan, SK Menhumham, Ijin HO, Ijin SPPL, NPWP, SIUP, TDP dan Stempel Perusahaan.

PT. Fajar Wana Indonesia belum berkegiatan, baru sebatas membangun komunikasi untuk peluang kerjasama. Beberapa peluang diantaranya: menjalin diskusi dan hubungan dengan LEI untuk kemudian diarahkan sebagai salah satu lembaga pendamping dan/atau sertifikasi untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat secara lestari; membangun komunikasi dan diskusi penjangkauan dengan beberapa pihak untuk melihat peluang dalam memberikan fasilitas layanan pemetaan dengan teknologi Wahana Tanpa Awak (WTA)

LAYANAN INFORMASI

Bentuk dari komitmen FWI dalam keterbukaan informasi adalah melakukan layanan pertukaran data dan informasi. Terkait layanan informasi, FWI telah menyusun prosedur standar Layanan dan Pertukaran Informasi beserta Form Permintaan Informasi. Dalam periode Juni 2015-2019, tercatat dari tahun ke tahun semakin bertambah pemohon informasi kepada FWI dapat dilihat pada grafik di samping. Sekitar 397 permohonan informasi yang dilayangkan kepada FWI dan yang telah terlayani. Kebutuhan informasi berkisar



data tabular dan shapefile terkait dengan kondisi tutupan hutan, konsesi hutan dan lahan, dll. Catatan layanan dan pertukaran informasi lebih rinci dalam periode Juni 2015 - 2019, disajikan dalam **Lampiran 3**.

PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI

Audit lembaga sebagai prasyarat untuk menunjukkan bahwa FWI adalah organisasi yang transparan dan akuntabel. Audit Lembaga sudah dilakukan untuk tahun 2015-2018. Dan saat ini FWI sedang mempersiapkan akan melakukan audit laporan untuk tahun 2019.

Secara detail, kondisi keuangan Perkumpulan FWI sampai dengan Desember 2019 serta realisasi dari Rencana Anggaran tahun 2015 – 2019 disajikan dalam **Lampiran 4**.

Untuk proyek-proyek yang dikelola FWI dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain:

Proyek-proyek yang dikelola FWI selama 2015-2019, diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program kerja FWI di atas, terfokus pada isu-isu yang menjadi perhatian FWI, serta menjalankan mandat kerja organisasi.

Tabel 6. Proyek-Proyek yang Dikelola

No	Tahun	PEMBERI DANA/ DUKUNGAN	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	Budget	Ket
1	2013-2015	WRI, funded by NORAD	Strengthen National and Local Forest Governance	Central Kalimantan, West Nusa Tenggara, Riau, and Papua	USD 357.848	Close
2	2014, 2015	EIA, funded by EU	Strengthening FLEGT in East Asia through civil society tracking of timber flows	Indonesia	GBP 78.643	Close
3	2013-2015	The Asia Foundation, Setapak-I	Strengthening the basic of data, partners capacity, and making and dissemination the book “The state of Indonesian Forest”	Indonesia	IDR 1.757.721.560	Close
4	2014-2015	Rainforest Foundation Norway (RFN)	“To save the last natural forest in the island of Aru from the threat of the expansion of sugar cane plantations” Campaign	Kepulauan Aru-Maluku	NOK 318.500	Close
5	2015 – 2018	EIA, funded by DFID	Strengthening forest governance through civil society monitoring and tracking illicit timber flows	Jakarta, North Sumatera, North Maluku, Riau, Jambi, North Kalimantan, West Papua, Central Java, South Sulawesi	Euro 312,021	Close
6	2016-2019	The Asia Foundation, Setapak II	Increasing forest governance on public information openness, forest licence, and monitoring the capacity of Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jakarta, East Kalimantan, South Sumatera, South Sulawesi, Papua, Aceh, Riau, West Sumatera, South Kalimantan	5.981.295.550 IDR	Close
7	2017	SIEMENPUU	Strengthening of CSO Network on Mangrove Conservation in Indonesia	East Kalimantan, Jakarta	327.900.000 IDR	Close
8	2017-2018	ICCTF	Strengthening collaboration of multi stakeholder in climate change mitigation	Bogor, West Java, Jakarta	1.983.360.000 IDR	Close
9	2018-2022	RFN	Promoting information justice as a contribution to stopping the expansion of land-based extractive industries and protecting indigenous peoples territories in order to save the remaining natural forest in Papua Bioregion	Papua Bioregion	8.867.000.000 IDR	Sedang Berjalan
10	2019	BIJAK	Identifying the potential Essential Economy Areas located outside the conservation areas and outside forest areas along with the management structure of Essential Economy Areas	Indonesia	886.610.000 IDR	Sedang Berjalan

Selain itu, ada potensi pendanaan di tahun 2019 yang dijajaki oleh FWI, diantaranya:

1. Samdhana Institute, Desember awal sudah ttd MoU senilai 250.000.000 IDR
2. FAO-EU FLEGT Programme

PENGELOLAAN ASET

Inventarisasi aset dan peralatan kerja (**Lampiran 5.**)

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

1. Daftar Publikasi FWI 2015-2019
2. Daftar Liputan Media 2015-2019 dan Daftar Publikasi yang merujuk data FWI 2015-2019
3. Daftar pertukaran informasi 2015-2019
4. Status Keuangan 2015-2019
5. Daftar Aset dan Peralatan Kerja FWI 2015-2019

Lampiran 1. Daftar Publikasi 2015-2019

1	Analisis Berbasis Murni Bumi Langit	Hidayat, M. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Studi	---	Publikasi	2015(12)	
2	Mentawai – Pulau yang Terhempas dan Kehilangan Sauri	Hidayat, M. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Studi	---	Publikasi	2015(12)	
3	Aspek Publik – Peran Sektoral-Kelompok Industri 2004-2011 – (Bag. 2)	Yusuf, M. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
4	Evaluasi Sifat Mestilasi Berbasis Nelayan	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
5	"JANGAN SUSAH MELAKUKAN" yang Jadi Gang Perikanan	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
6	Keunggulan Nelayan dengan "Tempat Nelayannya yang Rangsang Nelayan"	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
7	Mengungkap Asal Perikanan Pulau Pulau Kecil yang Berkaitan dengan Sempurna Perikanan	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
8	Nelaya Pulau-Pulau Kecil (I) Sauri dan	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
9	Keputusan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
10	Wanula Nelayan Ekstrem Nelayan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
11	Mengungkap Asal Dauri Berbasis Di Lingkungan Nelayan dan Melakukakan Penghasilan Ekstrem Nelayan	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
12	Kelak Nelayan (I) di Indonesia	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
13	Keputusan Perikanan, Sauri Sauri – Perikanan Nelayan Melakukakan Sauri Nelayan (I) di Indonesia	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	
14	Keputusan Perikanan, Sauri Sauri – Perikanan Nelayan Melakukakan Sauri Nelayan (I) di Indonesia	Wahid, S. (2015). <i>WISATA BUDIDAYA, KEMISKINAN, DAN MELAKUKAN ULANG</i>	Uraian-Aspek	---	Publikasi	2015(12)	

Lampiran 1. Daftar Publikasi 2015-2019

11	Informasi Keterbukaan Informasi (IKI) dalam Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda, Nurul Huda, Nurul Huda	Jurnal Publikasi	---	Submitted 2015/2015	
12	Public Information Disclosure (PID) dan Implementasinya di Sektor Kehutanan (Studi Kasus: Sektor Kehutanan)	Muhammad Hidayat, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
13	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Jurnal Publikasi	---	Submitted 2015/2015	
14	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
15	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
16	Penerapan Peraturan yang Menyebutkan Tata Kelola Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
17	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
18	Tanggung Jawab Sosial (TJSP) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
19	Tata Kelola Kehutanan (TKK) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Jurnal Publikasi	---	Submitted 2015/2015	
20	Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
21	Evaluasi Kinerja (EK) dan Penerapannya di Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
22	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Geospasial (SIG) terhadap Kinerja Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	
23	Hubungan Antara Penerapan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan Kinerja Sektor Kehutanan	Muhammad Hidayat, Nurul Huda, Nurul Huda	Skripsi	---	Submitted 2015/2015	

Lampiran 1. Daftar Publikasi 2015-2019

<input type="checkbox"/>	Penelitian Hutan Ekstrem Langsung Penderitaan Kejadian Kawasan Hutan	Dokumentasi	Newspaper	---	Publikasi 2015/2015	
<input type="checkbox"/>	Dokumentasi Tempa Henti	Dokumentasi, PBL, Video WISATA INDONESIA, Kementerian Perikanan, Perikanan Internasional, Publik, Melalui Video - Youtube, Uluak	Buku		Publikasi 2015/2015	
<input type="checkbox"/>	Dokumentasi Dan Kritik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Kebijakan Pengelolaan Hutan	Dokumentasi PBL, Video, WISATA INDONESIA, PBS, Peraturan Desa, Perus, Kebijakan hutan Indonesia	Newspaper	---	Publikasi 2015/2015	
<input type="checkbox"/>	Tinjauan Hukum Pemukiman Informasi yang Tidak Sempurna Sungai dan Berwujud Sisk (Nasional Report)	Video, HIMAN INDONESIA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / SPN, Perumahan, Informasi Publik, PBL	Jurnal Publik	---	Publikasi 2015/2015	
<input type="checkbox"/>	Publikasi Buku Orang Muda Matrik Solusi Opil Petulu Hutan	Dokumentasi, Video, WISATA INDONESIA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / SPN, Berwujud Informasi	Newspaper	---	Publikasi 2015/2015	
	Hutan Lindung dan Komersial dalam Rumpun Sawit	Dokumentasi, Gambar, Video, Laporan, Video Berwujud, Sisk	Jurnal Publik	---	Publikasi 2015/2015	
	Mendukung Perbaikan Tata Kelola Hutan Berbasis KPI	Artikel, Gambar, Pengalaman Hutan, Amfibi, Paper, Sumatera, Sisa Kuba Hutan, Tempang, Sisk, Sisk	Jurnal Publik	---	Publikasi 2015/2015	
	ANGKA DEFORESTASI SEBAGAI "JALAN" SENSUALISASI HUTAN INDONESIA	Dokumentasi, HIMAN INDONESIA, Jurnal, Foto, Satu Nelaya (Sisk)	Jurnal Publik	---	Publikasi 2015/2015	
	Tematik Spesial MA Gertu Uluak (HCE) / Aseratif Informasi Spesial "Seluruh Dimensi Untuk Tabik Terbuka"	HCE, Informasi Berwujud, Berwujud Informasi Naka	Buku	---	Publikasi 2015/2015	
	Dokumentasi Di Jelmesta: "Aman" Pengelolaan Hutan Yang Tidak Lagi Salingan	Dokumentasi, HCE, HCE, PERSEKUTUAN SISK, WISATA INDONESIA	Photo Release	---	Publikasi 2015/2015	
	Perwakilan Urusan Ibu Kota Kec: TERGESA GESA (dan TERTUTUP	Dokumentasi, Hutan, HIMAN INDONESIA, Sisk, WISATA SISK, SISK WISATA AMBI	Photo Release	---	Publikasi 2015/2015	
	Menggagas Visi Kerakyhan dan Lingkungan Hidup Indonesia	Dokumentasi, PBL, Video, HIMAN INDONESIA, Sisk, Sisk Hutan, FORC INDONESIA, Berwujud, Informasi Publik, Sisk, KPI, UACIS, Sisk, Sisk	Photo Release	---	Publikasi 2015/2015	

Lampiran 4. Lampiran Laporan Keuangan - Posisi Keuangan

Forest Watch Indonesia
Laporan Posisi Keuangan
Per 30 November 2019 (Un Audited)

ASET	
Aset Lancar	
Kas kecil	5,000,000
Bank	
Bank BNI No.Rek 3903900379	74,416,835
Bank BNI No.Rek 3903900335	343,073,016
Bank BNI No.Rek 3903900346	1,466,228
Bank BNI No.Rek 3903900357	109,694,845
Bank BNI No.Rek 3903900368	38,159,373
Bank BNI No.Rek 3903900380	313,236,514
Bank BNI No.Rek 3903900391	1,054,413
Total Kas & Bank	886,101,224
Uang Muka	
Uang muka Sekretariat FWI	2,200,000
Uang Muka Program RFN	77,000,000
Uang Muka Program TAF	55,500,000
Total Uang Muka	134,700,000
Piutang Internal	
Piutang Staff	94,915,700
Piutang Sekretariat kpd Program	223,735,000
Total Piutang	318,650,700
Total Aset Lancar	1,339,451,924
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	
Tanah & Bangunan	1,290,869,200
Kendaraan	203,000,000
Peralatan Kantor	643,483,077
Perlengkapan Kantor	117,405,351
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-142,950,720
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-190,312,503
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	-598,031,265
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor	-93,667,953
Total Aset Tetap	1,238,785,187
TOTAL ASET	2,578,237,111
HUTANG DAN ASET NETO	
Hutang Internal	
Hutang Program kpd Sekretariat	223,735,000
Aset Neto	
Aset Neto Awal Tahun	2,936,536,650
Perubahan Aset Neto	-582,034,539
	2,578,237,111

Lampiran 4. Laporan Keuangan - Laporan Aktifitas

Forest Watch Indonesia
Laporan Aktifitas
Periode 01 Januari 2019 - 30 November 2019 (Un Audited)

PENERIMAAN	◇	◇
PENERIMAAN TIDAK TERKAT		
Donasi		1,504,115,000
Iuran Anggota		500,000
Jasa Giro Bank		6,163,562
Total Penerimaan Tidak Terikat		1,510,778,562
PENERIMAAN TERKAT		
Penerimaan Dana Grant Program TAF		472,911,790
Penerimaan Dana Grant Program RFN		1,820,896,839
Penerimaan Dana Grant Program BIJAK		555,810,000
Jasa Giro Bank Program		2,337,836
Total Penerimaan Terikat		2,851,956,465
Total Penerimaan		4,362,735,027
PENGELUARAN		
Pengeluaran Tidak Terikat		
Gaji		1,170,850,000
Honorarium		2,000,000
Tunjangan Staff		155,350,000
Transport Lokal & Perjalanan Dinas		23,492,290
Konsumsi		139,949,820
Rumah Tangga		7,292,970
ATK & Fotocopy		5,660,200
Paket Pos & Materai		5,002,700
Komunikasi (Telp & Internet)		4,992,234
Listrik, Air PAM&Gas Alam		8,033,242
Koran & Majalah		2,160,000
Iuran RT RW		995,000
Pajak PPH Ps 21		14,002,490
Perlemuan Internal		57,545,595
Servis Peralatan&Pembelian Suku Cadang Komputer		7,012,480
Perawatan Kantor		17,416,500
Cetak Buku & Buletin		1,754,500
Pengobatan Staff		26,209,445
Perlengkapan Kantor		1,619,740
Sumbangan		11,643,380
BPJS Kesehatan		6,208,500
Translata		1,499,500
Pajak, Asuransi & Servis Kendaraan Kantor		5,274,828
Media & Komunikasi		16,715,177
Data & Informasi	◇	50,000
Kampanye & Advokasi		14,642,455
Gathering FWI		40,122,888
Kontribusi FWI kepada RFN		10,000,000
Administrasi Bank		1,950,000
Biaya Penyusutan		
Bangunan		28,321,500
Kendaraan		42,291,670
Peralatan Kantor		25,064,165
Perlengkapan Kantor		13,253,485
Total Pengeluaran Tidak Terikat	◇	1,868,576,921
Pengeluaran Terikat		
Program TAF		868,825,400
Program RFN		1,317,004,429
Program BIJAK		680,062,636
Total Pengeluaran Terikat		2,875,892,465
Perubahan Aset Neto		
Lebih / (kurang) Dana Tidak Terikat		-357,798,339
Lebih / (kurang) Dana Terikat		-224,236,200
Perubahan Aset Neto		-582,034,539

Lampiran 4. Laporan Keuangan - Laporan Arus Kas

Forest Watch Indonesia
Laporan Arus Kas
Periode 1 Januari 2019 - 30 November 2019 (Un Audited)

Arus Kas dari Aktivitas Operasional	
Perubahan Aset Nelo	-582,034,539
Akumulasi Penyusutan	
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	28,321,600
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	42,291,670
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	19,857,134
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor	13,253,485
Hutang Program kpd Sekretariat	223,735,000
Uang muka Sekretariat FWI	11,274,500
Piutang Staff	11,700,000
Hutang Pajak (PPH Ps 21)	-5,737,837
Hutang kpd Pihak Lain	-30,000,000
Uang Muka Program RFN	-77,000,000
Uang Muka Program TAF	-55,500,000
Titipan Dana FWI	-910,000
Piutang Sekretariat kpd Program	-223,735,000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	-624,483,987
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Pengurangan Aset Tetap	8,331,250
Penambahan Aset Tetap	-7,685,000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	646,250
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	1,509,938,961
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	886,101,224



Forest Watch Indonesia

good forest governance needs good forest information



Jl. Sempur Kaler No. 62
Kelurahan Sempur
Bogor 16129



www.fwi.or.id
petahutan.fwi.or.id
perpustakaan.fwi.or.id



Forest Watch Indonesia



@pemantauhutan



Pemantau hutan



@fwindonesia



Pemantau hutan